

Judul : Akom: Tolong, Terus Pelototi Kinerja Kami
Tanggal : Senin, 30 Mei 2016
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Agar Tak Ada Lagi Anggota DPR
Ditangkap KPK

Akom: Tolong, Terus Pelototi Kinerja Kami



Ade Komarudin

KETUA DPR Ade Komarudin meminta publik dan media terus memelototi Badan Anggaran (Banggar) DPR yang tengah membahas APBN Perubahan 2016 dan RAPBN 2017. Dengan pengawasan itu, diharapkan tidak ada lagi praktik pencaloan anggaran.

"DPR harus terus diawasi. Apalagi di masa-masa pembahasan APBN Perubahan 2016 dan RAPBN 2017. Wartawan saya harapkan ikut memelototi semua prosesnya," kata politisi yang akrab disapa Akom ini saat Press Gathering di Batam, akhir pekan kemarin.

Memang, bukan rahasia umum pembahasan anggaran jadi praktik pencaloan. Banyak anggota DPR yang sudah ditangkap KPK akibat praktik merampok uang rakyat itu.

Akom tidak ingin kejadian itu terus berulang. Untuk mencegah, penindakan dari KPK saja tidak cukup. Pengawasan sejak

awal justru lebih penting agar pihak-pihak yang berniat menjadi calon anggaran tidak bisa menjalankan aksinya.

Akom yakin, keterlibatan media dan publik dalam pengawasan tugas-tugas parlementer bisa mengurangi jumlah anggota Dewan masuk hotel prodeo alias penjara. Pengawasan itu juga bisa meningkatkan akuntabilitas Dewan sekaligus mengangkat citra DPR di mata publik.

"Kasihlah, DPR sudah bonyok, sudah banyak anggotanya yang ditangkap. Makanya, saya cenderung melakukan tindakan preventif seperti pengawasan oleh wartawan guna mengurangi yang ditangkap," ujarnya.

Kalau media dan masyarakat tidak ikut mengawasi para anggota Dewan, Akom khawatir operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terulang kembali. "Akan apes terus anggota Dewan ini. Tolonglah dipelototi betul. Pelototi pembahasan APBNP."

Direktur Eksekutif Banggar Watch Fahmi Hafel mengapresiasi keterbukaan Akom ini. Sebab, praktik mafia anggaran di Banggar kerap terjadi saat penyusunan APBNP.

Menurutnya, mafia anggaran juga kerap menggandeng pengusaha daerah. Oknum anggota Dewan itu mengatur agar pengusaha dimaksud dapat proyek. Kemudian, yang bersangkutan mendapat imbalan dengan jumlah yang cukup besar. "Untuk itu kinerja anggota DPR di Banggar wajib diawasi," katanya. ■ QAR